



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan yang mencolok selama beberapa dasawarsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin pentingnya informasi dan data dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Peranan data dan informasi bagi instansi pemerintah sangat vital dalam proses penyusunan program dan anggaran, selain itu data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengelolaan data dan informasi menjadi sangat penting pada setiap perangkat daerah.

Selanjutnya informasi yang berkualitas baik adalah informasi yang memiliki syarat-syarat : ketersediaan data, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, handal, akurat dan konsisten. Mengingat kemajuan teknologi saat ini, data dan informasi dapat memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap proses penyusunan program dan anggaran OPD pada masa kini. Dengan pengelolaan yang baik serta didukung teknologi terkini, data dan informasi dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan.



Pengetahuan inilah yang memungkinkan terciptanya program/kegiatan yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien.

Data dan informasi bukan hanya berguna pada tahap pelaksanaan kegiatan rutin pada level terbawah unit kerja dalam struktur organisasi pemerintah, namun pada tahap yang lebih tinggi data dan informasi dapat digunakan dalam upaya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bahkan digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kemana sebaiknya suatu Perangkat Daerah bergerak di masa mendatang. Data dan informasi juga sangat berguna dalam pengembangan organisasi secara berkesinambungan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Perubahannya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perubahannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2021;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 adalah memberikan gambaran makro mengenai kondisi pembangunan di Kabupaten Belu.

Tujuan disusunnya Buku Profil Kabupaten Belu Tahun 2019 adalah sebagai salah satu dokumen pendukung yang secara khusus memuat tentang data makro kinerja pembangunan di Kabupaten Belu, selain itu untuk memberikan gambaran capaian kinerja pembangunan Tahun 2018.



BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS





Kabupaten Belu sebagai salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di Pulau Timor dan merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL). Astronomi wilayah Kabupaten Belu terletak antara koordinat 124°40' 33 - 125°15'23" Bujur Timur dan 08°70'30" - 09°23'30" Lintang Selatan. Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Belu meliputi :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Ombai
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Malaka
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara RDTL
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel II.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN BELU BERDASARKAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	PERSENTASE (%)
1	Raimanuk	129.924	11.55
2	Tasifeto Barat	223.914	19.90
3	Kakuluk Mesak	129.32	11.49
4	Nanaet Duabesi	67.818	6.03
5	Kota Atambua	16.301	1.45
6	Atambua Barat	10.994	0.98
7	Atambua Selatan	11.198	1.00
8	Tasifeto Timur	209.477	18.62
9	Raihat	75.528	6.71
10	Lasiolat	61.492	5.47
11	Lamaknen	92.5	8.22
12	Lamaknen Selatan	96.674	8.59
JUMLAH KESELURUHAN		1,125.14	100.00

Sumber : Ranperda RTRW Kab.Belu, BP4D Tahun 2018



Berdasarkan geografis Kabupaten Belu terletak di bagian paling timur dan berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 km dan berada di jalur perlintasan internasional dengan Negara RDTL.

Kabupaten Belu memiliki luas wilayah daratan 1.125,14 km² terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 81 desa/kelurahan, 69 desa dan 12 kelurahan serta 419 dusun/lingkungan dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat seluas 223,914 km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 km².

TABEL II.2
JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN BELU

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN (Km)
1	Raimanuk	Arekama	41,0
2	Tasifeto Barat	Kimbana	17,5
3	Kakuluk Mesak	Umarese	14,0
4	Nanaet Duabesi	Tete Seban	35,0
5	Kota Atambua	Tenukiik	1,5
6	Atambua Barat	Sesekoe	4,0
7	Atambua Selatan	Asuulun	5,7
8	Tasifeto Timur	Wedomu	13,0
9	Raihat	Bei Sari Loo	33,0
10	Lasiolat	Lafuli	20,0
11	Lamaknen	Weluli	35,0
12	Lamaknen Selatan	Pie Bulak	49,6

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab. Belu

Kabupaten Belu memiliki 2 (dua) kecamatan yang berada di daerah pesisir yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur.



Kecamatan Kakuluk Mesak dengan 4 (empat) desa pesisir yaitu Desa Kenebibi, Desa Jenilu, Desa Dualaus, Desa Fatuketi dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan 1 (satu) desa pesisir yaitu Desa Silawan sedangkan 64 desa dan 12 kelurahan merupakan daerah non pesisir dengan daratan yang berbukit dan lembah.

Jarak terjauh dari ibukota kabupaten berada pada Kecamatan Lamaknen Selatan dengan ibukota kecamatan Pie Bulak sedangkan jarak terdekat berada pada Kecamatan Kota Atambua dengan ibukota kecamatan Tenukiik.

Tabel II.3
DESA PERBATASAN BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU

NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
I	Tasifeto Barat		
	1. Desa Looku	Batulu	25.21
II	Nanaet Duabesi		
	1. Desa Nanaenoe	Nanaenoe	12.22
	2. Desa Fohoeka	Laktutus	12.21
	3. Desa Nanaet	Nanaet	12.21
III	Tasifeto Timur		
	1. Desa Dafala	Dubasa	19.7
	2. Desa Takirin	Fatubesi	9.3
	3. Desa Tulakadi	Salore	15.95
	4. Desa Silawan	Nanaeklot	30
	5. Desa Sadi	Kopan	18
	6. Desa Sarabau	Tunamuaren	12.6
IV	Lasiolat		
	1. Desa Maneikun	Motaain	9.1
	2. Desa Lasiolat	Halibete	9.2
	3. Desa Budaok	Mahein	7
	4. Desa Fatulotu	Ailomea	7



NO	KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
V	Raihat		
	1. Desa Asumanu	Raibubu	22.95
	2. Desa Tohe	Sikutren	32.55
	3. Desa Maumutin	Turiskain	9.56
VI	Lamaknen		
	1. Desa Lamaksenulu	Builalu	9.33
	2. Desa Makir	Tahon	14.09
	3. Desa Mahuitas	Bora	9.1
	4. Desa Kewar	Kewar	21.64
	5. Desa Maudemu	Oloboe	17
VII	Lamaknen Selatan		
	1. Desa Henes	Gelaba	6.22
	2. Desa Lakmaras	Sabulmil	21.39
	3. Desa Loonuna	Liu	10.31
	4. Desa Lutharato	Manewain	15
	5. Desa Sisifatuberal	Fatuberal	5
	6. Desa Debululik	Debululik	12
JUMLAH KESELURUHAN		28 Desa	405.84

Sumber : Bagian Perbatasan Setda Kab.Belu Tahun 2019

Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan secara administrasi mempunyai 29 Desa di 7 (tujuh) kecamatan yang berbatasan darat dengan Negara RDTL sehingga di beberapa desa terdapat pos lintas batas dengan petugas dari TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina seperti Pos Lintas Batas Mota'ain Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur, Pos Batas Turiskain Desa Maumutin Kecamatan Raihat, Pos Batas Laktutus Desa Fohoeka Kecamatan Nanaet Duabesi, Pos Batas Builalu/Dilumil Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen.



2.2. KONDISI KLIMATOLOGI

Kabupaten Belu umumnya memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5°-33,7°C. Temperatur terendah (21,5°C) terjadi pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi (33,7°C) terjadi pada bulan November. Kabupaten Belu termasuk wilayah dengan iklim tipe D (iklim semi arid) atau iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan.

Musim penghujan tahun 2017 dimulai di bulan Januari sampai dengan bulan April dimana hujan turun sebanyak 49 hari selama 4 bulan, pada bulan Juli hujan turun hanya 3 hari dan selanjutnya hujan lagi pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 43 hari.

TABEL II.4
JUMLAH CURAH DAN HARI HUJAN MENURUT BULAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

STASIUN PENGUKURAN HUJAN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN
1	2	3
Januari	540.00	15
Februari	475.00	13
Maret	453.00	18
April	161.00	3
Mei	0.00	0
Juni	0.00	0
Juli	45.00	3
Agustus	0.00	0
September	6.00	1
Oktober	340.00	7
Nopember	576.00	13
Desember	580.00	22

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu



2.3. KONDISI HIDROLOGI

Daerah aliran sungai di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40% sehingga sangat peka terhadap erosi.

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng sehingga membentuk sub daerah aliran sungai ataupun daerah aliran sungai mikro.

TABEL II.5
NAMA DAN PANJANG SUNGAI BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU

NO	KECAMATAN	NAMA SUNGAI	PANJANG SUNGAI (KM)
1	Tasifeto Barat	Buik	40
		Luradik	10
2	Tasifeto Timur	Baukama	45
		Baukoek	10
		Motamoru	15
3	Lamaknen	Welulik	18
		Malibaka	50
4	Kota Atambua	Talau	5

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

2.4. KONDISI TOPOGRAFI

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut :



1. Kemiringan lereng 0-8%, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai utara dan sekitar Kecamatan Kakuluk Mesak, Kota Atambua, Atambua Selatan dan Atambua Barat.
2. Kemiringan lereng 8-15%, yaitu daerah datar yang hanya terdapat pada Kecamatan Tasifeto Barat.
3. Kemiringan lereng 15-25%, merupakan daerah landai atau bergelombang terdapat di daerah lembah, terletak diantara pegunungan seperti di Kecamatan Raihat, Lasiolat, Lamaknen, Raimanuk, dan bagian timur Kecamatan Tasifeto Barat.
4. Kemiringan lereng 25-40%, yaitu daerah bergelombang dan berbukit terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur, Nanaet Duabesi, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, dan Raimanuk.
5. Kemiringan lereng di atas 40%, terdapat di Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat, sebagian besar Lamaknen dan Lamaknen Selatan.

2.5. KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Belu pada tahun 2017 sebanyak 222.521 jiwa, dan terbagi dalam 53.093 KK yang tersebar pada 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Atambua Barat yaitu 30.738 jiwa dan jumlah KK sebanyak 7.239 KK. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Lamaknen Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.178 jiwa dan 1.226 KK.



Tabel di bawah menunjukkan secara detail presentasi jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2017.

TABEL II.6
DATA PENDUDUK DAN KEPADATAN KABUPATEN BELU TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK	ANGKA KEPADATAN	
		L	P	JUMLAH		LUAS	KEPADATAN
1	Raimanuk	6449	6573	13022	3316	105.90	122.97
2	Tasifeto Barat	13309	13064	26373	6779	211.37	124.77
3	Kakuluk Mesak	7570	7490	15060	3753	87.20	172.71
4	Nanaet Duabesi	13031	12792	25823	6081	224.19	115.18
5	Kota Atambua	11415	11237	22652	5894	187.54	120.78
6	Atambua Barat	15765	15734	31499	7652	24.90	1265.02
7	Atambua Selatan	8763	8669	17432	4050	179.42	97.16
8	Tasifeto Timur	3684	3581	7265	1691	64.48	112.67
9	Raihat	4340	4376	8716	2010	108.41	80.40
10	Lasiolat	12548	12151	24699	6083	15.51	1588.36
11	Lamaknen	13716	13172	26888	6361	15.73	1709.35
12	Lamaknen Selatan	2425	2555	4980	1161	60.25	82.66
JUMLAH		113015	111394	224409	54831	1284.90	174.65

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Belu Tahun 2019

Angka kepadatan penduduk secara umum di Kabupaten Belu tahun 2018 adalah sebesar 174,65 jiwa/km², dan Kecamatan Lamaknen merupakan wilayah dengan angka kepadatan tertinggi yaitu 1,709.35 jiwa/km² sedangkan Kecamatan Raihat adalah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu 80,40 jiwa/km².

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belu tahun 2018 adalah sebesar 1,13%, dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Raihat yakni sebesar 3,46%.



Sedangkan di beberapa kecamatan angka laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif artinya terjadi pengurangan penduduk seperti di Kecamatan Lasiolat sebanyak -0,88, Raimanuk -1,05, Lamaknen Selatan -1,38, dan Atambua Barat -3,81.

TABEL II.7
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN BELU TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK SEM II 2017	JUMLAH PENDUDUK SEM II 2018	ANGKA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	Raimanuk	17353	13022	5.51
2	Tasifeto Barat	25216	26373	6.58
3	Kakuluk Mesak	21408	15060	5.07
4	Nanaet Duabesi	5178	25823	2.41
5	Kota Atambua	30738	22652	5.81
6	Atambua Barat	25946	31499	2.48
7	Atambua Selatan	29316	17432	0.46
8	Tasifeto Timur	24475	7265	0.33
9	Raihat	14333	8716	0.13
10	Lasiolat	7241	24699	-4.81
11	Lamaknen	12342	26888	-8.28
12	Lamaknen Selatan	8705	4980	-3.82
JUMLAH		222251	224409	0.85

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Belu Tahun 2019



BAB III ARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.1. VISI

Visi Kabupaten Belu sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021 adalah : **“BELU YANG BERKUALITAS, MANDIRI, MAJU, DEMOKRATIS, DAN BERBUDAYA”**

3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 4 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu :

Misi 1

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini bertujuan untuk:

1. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang unggul, terjangkau, dan merata.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi standar pelayanan minimal.
3. Peningkatan akuntabilitas manajemen pengelolaan pendidikan.
4. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga.
5. Peningkatan pembangunan kebudayaan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.



7. Peningkatan daya saing ketenagakerjaan.
8. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga.
9. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.
10. Peningkatan koordinasi pelayanan sosial masyarakat.
11. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.
12. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD.

Misi 2

Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi ini bertujuan untuk:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat dan kapasitas ekonomi unggulan berbasis pertanian.
2. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
3. Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.
4. Peningkatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah.
5. Peningkatan kualitas dan pelayanan Koperasi, UMKM, dan LEPMM.
6. Peningkatan dan pengembangan industri, perdagangan, dan pusat ekonomi kerakyatan.
7. Peningkatan kualitas penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan terpadu.

Misi 3

Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai wilayah perbatasan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Misi ini bertujuan untuk :

1. Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah perbatasan berbasis tata ruang.
2. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik.
3. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan sumberdaya energi dan sumberdaya mineral.

Misi 4

Meningkatkan kinerja birokrasi, penegakan hukum, dan kualitas pelayanan publik.

Misi ini bertujuan untuk:

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip *good governance*.
2. Peningkatan koordinasi kepastian hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur.
5. Peningkatan kapasitas pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas penanggulangan bencana daerah.
7. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan daerah.
8. Peningkatan kualitas pelayanan Sekretaris Dewan.
9. Peningkatan pembinaan dan pengembangan KORPRI.



10. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan.
11. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kelurahan.
12. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
13. Peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa dan pengembangan politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
14. Peningkatan sarana dan prasarana TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) kabupaten.
15. Peningkatan kualitas penerangan masyarakat.
16. Peningkatan kualitas penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
17. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
18. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.
19. Peningkatan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
20. Peningkatan jangkauan pelayanan transmigrasi.
21. Peningkatan pelayanan kearsipan dan dokumentasi daerah.



BAB IV SOSIAL BUDAYA

4.1. KESEHATAN

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Berikut data sebaran sarana kesehatan di Kabupaten Belu tahun 2017.

Tabel IV.1
SARANA KESEHATAN BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEM BANTU	POLINDES	POSKESDES	POSBINDU	POSYANDU	BALAI PENGOBATAN SWASTA	JUM LAH PER KECAMATAN
1	RAIMANUK	2	1	2	5	2	48	0	60
2	TASIFETO BARAT	1	2	1	5	2	48	0	59
3	KAKULUK MESAK	3	2	5	2	17	56	1	86
4	NANAET DUABESI	1	1	2	2	2	22	0	30
5	KOTA ATAMBUA	1	1	3	0	2	14	1	22
6	ATAMBUA BARAT	1	1	3	0	2	19	0	26
7	ATAMBUA SELATAN	1	1	4	2	5	32	1	46
8	TASIFETO TIMUR	2	2	6	4	9	52	0	75
9	RAIHAT	1	1	2	2	6	33	0	45
10	LASOLAT	1	0	5	5	1	21	1	34
11	LAMAKNEN	2	2	4	6	7	44	1	66
12	LAMAKNEN SELATAN	1	4	5	4	1	30	0	45
JUMLAH PER JENIS		17	18	42	37	56	419	5	594

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas PMD Kab. Belu Tahun 2018



Ketersediaan sarana kesehatan yang memadai perlu didukung dengan tenaga kesehatan yang professional di setiap kecamatan sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Belu.

Total sarana kesehatan di Kabupaten Belu sebanyak 594 buah dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan sarana kesehatan terbanyak di Kecamatan Kakuluk Mesak yaitu 86 buah, dan terendah di Kecamatan Kota Atambua yaitu 22 buah.

Tabel IV.2
TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI & KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KATEGORI	JUMLAH	PERSENTASE
1	PERAWAT	574	37.64
2	BIDAN	263	17.25
3	KETENISIAN MEDIS	134	8.79
4	TENAGA KEFARMASIAN	60	3.93
5	MEDIS	69	4.52
6	KESEHATAN LINGKUNGAN	36	2.36
7	TENAGA GIZI	49	3.21
8	KESEHATAN MASYARAKAT	44	2.89
9	KETERAPIAN FISIK	8	0.52
10	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	288	18.89
JUMLAH PER JENIS PROFESI		1525	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Belu Tahun 2018

Dengan ketersediaan tenaga kesehatan sebanyak 1.525 orang di Kabupaten Belu pada tahun 2017 yang tersebar di setiap kecamatan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang didukung dengan sarana kesehatan yang memadai.



Tabel IV.3 menjelaskan tentang kasus penyakit tertinggi yang terjadi di Kabupaten Belu. Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Atambua sebagai fasilitas kesehatan tertinggi di Kabupaten Belu, TBC masih merupakan kasus penyakit tertinggi dengan jumlah kasus 670, sementara di Instalasi Rawat Inap kasus penyakit Gastro Enteritis Akut (GEA) merupakan kasus penyakit tertinggi dengan jumlah 554 kasus.

Tabel IV.3
KASUS PENYAKIT TERTINGGI BERDASARKAN INSTALASI & JENIS PENYAKIT
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

INSTALASI RAWAT JALAN		INSTALASI RAWAT INAP	
JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS
TBC	670	GASTRO ENTERITIS AKUT (GEA)	554
DM	320	PNEUMONIA	431
ISPA	321	HIPERTENSI ESENSIAL PRIMER	262
HISTERELTOMI (HT)	310	TBC	249
BRONCHITIS	281	MAALARIA FALSIFARUM	229
PULPA DAN PERIAPIKAL	269	DISPESIA	224
GASTRO ENTERITIS AKUT (GEA)	230	ANEMIA LAINNYA	155
HIPERPLASIA PROSTAT	209	USUS DAN PERITONIUM LAMBUNG	151
GAGAL JANTUNG	169	HIV	135
DISPERIA	158	GASTRITIS	103
JUMLAH KESELURUHAN	2,937		2,493

Sumber: RSUD Atambua Tahun 2018

Tabel IV.4 menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat Kabupaten Belu pada tahun 2017.



Tabel IV.4
DATA BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	DATA	2017
1	KASUS KEMATIAN NEONATAL	26
2	KASUS KEMATIAN BAYI	39
3	KASUS KEMATIAN ANAK BALITA	3
4	KASUS KEMATIAN BALITA	42
5	KASUS KEMATIAN IBU	5
6	KASUS BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)	307
7	KASUS BMG	35
8	KASUS BARU TB BTA POSITIF	222
9	KASUS KEMATIAN TB PARU	4
10	KASUS PNEUMONIA BALITA	2046
11	KASUS HIV POSITIF	35
12	KASUS AIDS POSITIF	59
13	KASUS DIARE	4433
14	AFP RATE (NON POLIO)	4
15	KASUS DEMAM BERDARAH	3
16	KASUS MALARIA POSITIF	795
17	KASUS FILARIASIS	2
18	ANGKA KEMATIAN MALARIA (API)	0
19	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1	93.21
20	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4	74.25
21	CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN	85.93
22	CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN	83.31
23	CAKUPAN IBU BERSALIN YANG MENDAPAT YANKES NIFAS (KF3)	85.49

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Belu 2018

Kasus diare dan kasus pneumonia balita merupakan kasus kesehatan yang paling banyak terjadi di sepanjang tahun 2017. Ada sebanyak 4.433 kasus diare dan 2.046 kasus pneumonia balita.



Adapun cakupan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin mengalami peningkatan pada tahun 2017. Cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin di Kabupaten Belu cukup baik di mana persentase pelayanan terhadap ibu hamil K1 dan K4 masing-masing 93,21% dan 74,25%, cakupan pertolongan terhadap ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 85,93%, cakupan pertolongan terhadap ibu melahirkan di fasilitas kesehatan sebesar 83,31%, dan cakupan ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan nifas sebesar 85.49 %.

4.2. PENDIDIKAN

Pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Hubungan pendidikan dengan kehidupan ekonomi dari hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi, dalam arti makin tinggi derajat pendidikan makin tinggi pula derajat kehidupan ekonomi. Dalam kebijaksanaan pembangunan dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat digunakan untuk pembangunan bidang lain, termasuk pendidikan.

Pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Belu pada tahun 2017 disajikan dalam beberapa tabel dibawah ini.



Tabel IV.5
DATA TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN BELU TA.2017/2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH TK	ANAK DIDIK			JUMLAH PENDIDIK	SARANA GEDUNG	
			L	P	JUMLAH		KELAS	PERPUSTAKAAN
1	Raimanuk	2	45	69	114	5	1	-
2	Tasifeto Barat	4	56	47	103	12	12	1
3	Kakuluk Mesak	3	133	110	243	16	2	-
4	Nanaet Duabesi	-	-	-	-	-	-	-
5	Kota Atambua	5	203	261	464	40	23	1
6	Atambua Barat	4	197	231	428	33	4	-
7	Atambua Selatan	2	104	94	198	21	3	-
8	Tasifeto Timur	1	28	47	75	3	2	-
9	Raihat	-	-	-	-	-	-	-
10	Lasiolat	-	-	-	-	-	-	-
11	Lamaknen	2	28	47	75	5	4	-
12	Lamaknen Selatan	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		23	794	906	1,700	135	51	2

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu, 2018

Tabel di atas menggambarkan jumlah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Belu yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah Taman Kanak-Kanak sebanyak 23 buah dengan jumlah anak didik 1.700 orang yang didukung dengan tenaga pendidik sebanyak 135 orang dan sarana gedung kelas dan perpustakaan sebanyak 53 buah.

Kecamatan Kota Atambua merupakan kecamatan dengan jumlah Taman Kanak-Kanak terbanyak yaitu 5 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah anak didik sebanyak 464 orang, tenaga pengajar 40 orang, yang ditunjang dengan sarana ruang kelas sebanyak 23 kelas dan 1 perpustakaan.



Terdapat 4 kecamatan yang belum memiliki Taman Kanak-Kanak yaitu Kecamatan Nanaet Duabesi, Lasiolat, Raihat dan Lamaknen Selatan.

Tabel IV.6
DATA UMUM SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BELU TA.2017/2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA			JUMLAH GURU	SARANA PRASARANA	
				L	P	JUMLAH		RUANG KELAS	PERPUSTAKAAN
1	Raimanuk	12	110	1,124	1,068	2,192	143	137	6
2	Tasifeto Barat	20	183	2,034	1,907	3,941	284	183	8
3	Kakuluk Mesak	12	242	1,642	1,508	3,150	232	162	12
4	Nanaet Duabesi	5	40	288	285	573	52	45	5
5	Kota Atambua	12	212	2,411	2,806	5,217	306	192	13
6	Atambua Barat	7	88	1,374	1,529	2,903	128	79	5
7	Atambua Selatan	5	96	1,178	1,150	2,328	142	82	5
8	Tasifeto Timur	22	163	1,709	1,465	3,174	271	192	14
9	Raihat	14	109	1,157	1,122	2,279	203	132	10
10	Lasiolat	10	62	640	587	1,227	118	71	10
11	Lamaknen	18	59	1,196	1,013	2,209	177	146	13
12	Lamaknen Selatan	10	120	610	633	1,243	101	66	10
JUMLAH KESELURUHAN		147	1,484	15,363	15,073	30,436	2,157	1,487	111

Sumber : Dinas PK Kabupaten Belu Tahun 2018

Tabel IV.6 di atas menjelaskan bahwa jumlah Sekolah Dasar di Kabupaten Belu pada tahun 2017 sebanyak 147 buah dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 1.484 yang tersebar di setiap kecamatan. Sarana pendidikan berupa ruang belajar sebanyak 1.487 ruang dan perpustakaan sebanyak 111 buah. Jumlah siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Belu sebanyak 30.436 orang yang didukung dengan tenaga pendidik sebanyak 2.157 orang.



Kecamatan Tasifeto Timur merupakan kecamatan dengan jumlah Sekolah Dasar terbanyak yaitu 22 buah yang didukung dengan jumlah sarana dan prasarana yang terbanyak juga tetapi bukan kecamatan dengan jumlah rombongan belajar, siswa, dan tenaga pengajar terbanyak. Jumlah siswa Sekolah Dasar terbanyak justru berada di Kecamatan Kota Atambua sebanyak 5.217 orang dan tenaga pendidik sebanyak 306 orang. Jumlah rombongan belajar terbesar berada di Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 242.

Tabel IV.7 adalah tabel Data Umum Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belu menjelaskan bahwa jumlah Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2017 sebanyak 48 buah dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 437 yang tersebar di setiap kecamatan. Sarana ruang kelas sebanyak 437 dan perpustakaan sebanyak 38. Jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belu sebanyak 13.558 orang yang didukung dengan tenaga pendidik sebanyak 974 orang.

Kecamatan Tasifeto Barat merupakan kecamatan dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama terbanyak yaitu 9 buah yang didukung dengan jumlah sarana ruang kelas sebanyak 82 dan perpustakaan sebanyak 7. Sementara jumlah rombongan belajar sebanyak 82, siswa berjumlah 2.549, orang dan tenaga pengajar berjumlah 179 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama terkecil berada di Kecamatan Nanaet Duabesi yaitu hanya 1 sekolah, dengan ruang kelas 9, perpustakaan 1, rombongan belajar 9, jumlah siswa 201 orang, dan jumlah pengajar sebanyak 18 orang.



Tabel IV.7
DATA UMUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BELU TA.2017/2018

NO	KECAMATAN	JUM LAH SMP	JUM LAH ROM BEL	JUM LAH SISWA			JUM LAH GURU	SARANA PRASARANA	
				L	P	JUM LAH		RUANG KELAS	PERPUSTAKAAN
1	Raimanuk	4	27	362	467	829	74	27	3
2	Tasifeto Barat	9	82	1,175	1,374	2,549	179	82	7
3	Kakuluk Mesak	4	46	601	642	1,243	105	46	4
4	Nanaet Duabesi	1	9	94	107	201	18	9	1
5	Kota Atambua	6	68	1,185	1,178	2,363	148	68	5
6	Atambua Barat	3	33	626	590	1,216	67	33	3
7	Atambua Selatan	3	40	696	767	1,463	82	40	2
8	Tasifeto Timur	4	38	662	747	1,409	115	38	6
9	Raihat	4	24	196	235	431	47	24	2
10	Lasiolat	2	18	201	248	449	38	18	2
11	Lamaknen	4	15	390	559	949	69	37	1
12	Lamaknen Selatan	4	37	226	230	456	32	15	2
JUM LAH KESELURUHAN		48	437	6,414	7,144	13,558	974	437	38

Sumber : Dinas PK Kab. Belu Tahun 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%.



Tabel IV.8
CAPAIAN APK DAN APM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BELU TA 2017/2018

JENJANG - JENIS	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR	JUMLAH TOTAL PESERTA DIDIK	JUMLAH PESERTA DIDIK MENURUT KELOMPOK UMUR	APK	APM
PAUD/ TAMAN KANAK-KANAK	20.503	5.540	5.540	27,02	0
SD SEDERAJAT	25.609	27.090	21.718	105,78	84,81
SMP SEDERAJAT	13.265	14.416	10.124	108,68	76,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Belu Tahun 2018

Dari tabel IV.8 dapat diketahui persentase APK dan APM jenjang pendidikan dari PAUD/Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Persentase APK dan APM untuk jenjang pendidikan PAUD/Taman Kanak-Kanak masih rendah yaitu 27,02 dan 0, sementara untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama persentase APK 105,78 dan 108,68 dan persentase APM masing-masing 84,81 dan 76,32.

4.3. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pemerintah harus membuka semua pintu partisipasi dengan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda dan memiliki paradigma positif tentang kepentingan pemuda, dimana pemuda harus dilihat sebagai aset dan stakeholder utama dalam pembangunan sehingga aspirasi, kepentingan, dan cita-cita mereka menjadi paradigma utama pembangunan.



Peningkatan kualitas pemuda melalui penyaluran potensi pemuda di bidang olahraga diharapkan agar posisi pemuda bukan menjadi obyek pembangunan tetapi menjadi subjek/pelaku pembangunan.

Tabel IV.9
DATA KEPEMUDAAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	KARANG TARUNA	OMK	KUPP	IPP	IKM	PP	JUM LAH
1	RAIMANUK	8	4	0	0	0	0	12
2	TASIFETO BARAT	3	2	0	0	0	0	5
3	KAKULUK MESAK	2	1	0	0	0	0	3
4	NANAET DUABESI	2	0	0	0	0	0	2
5	KOTA ATAMBUA	2	0	0	0	0	0	2
6	ATAMBUA BARAT	3	1	0	0	0	0	4
7	ATAMBUA SELATAN	2	0	0	0	0	0	2
8	TASIFETO TIMUR	5	9	0	0	1	0	15
9	RAIHAT	3	2	0	0	0	0	5
10	LASIJLAT	3	5	1	0	1	0	10
11	LAMAKNEN	5	3	0	1	1	1	11
12	LAMAKNEN SELATAN	4	5	1	0	0	0	10
JUM LAH KESELURUHAN		42	32	2	1	3	1	81

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Belu 2018

Tabel IV.9 menggambarkan tentang jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Belu. Jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2017 sebanyak 81 dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Tasifeto Timur sebanyak 15 organisasi kepemudaan dan terendah di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kota Atambua, dan Atambua Selatan masing-masing sebanyak 2 organisasi kepemudaan.



Karang Taruna dan OMK (Orang Muda Katolik) merupakan organisasi kepemudaan yang cukup diminati, terlihat dari jumlahnya yang tersebar di semua kecamatan. Karang Taruna sebanyak 42 dan tersebar di semua kecamatan diikuti dengan Orang Muda Katolik (OMK) sebanyak 32 terdapat 9 kecamatan.

Tabel IV.10
DATA CABANG OLAHRAGA DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	CABANG OLAHRAGA	SUPER PRIORITAS	PRIORITAS	TAMBAHAN	TAHUN KEPENGURUSAN
1	Tinju	V			2016-2019
2	Taekwondo	V			2017-2021
3	Kempo	V			2014-2018
4	Silat	V			2014-2018
5	Karate	V			2016-2020
6	Atletik		V		2014-2018
7	Sepak Bola		V		2016-2020
8	Bola Basket		V		2016-2020
9	Bola Volley		V		
10	Bulu Tangkis		V		
11	Catur			V	2016-2020
12	Sepak Takraw			V	2016-2020
13	Criket/Pei		V		2017-2021
14	Fopi		V		2017-2021
15	Gateball		V		2016-2019
16	PABBSI		V		2016-2019
17	PTMSI		V		2016-2019
18	Futsal		V		2018-2021

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Kab.Belu Tahun 2018

Tabel IV.10 menggambarkan data cabang olahraga di Kabupaten Belu dengan rincian tahun kepengurusan dan cabang olahraga yang menjadi prioritas dari daerah yang sering diikutsertakan dalam ajang kejuaraan olahraga baik di tingkat provinsi maupun nasional.



Cabang olahraga tinju, taekwondo, kempo, silat, dan karate merupakan cabang olahraga super prioritas di Kabupaten Belu yang selalu diikutsertakan dalam ajang kejuaraan olahraga dan banyak meraih penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.

4.4. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembangunan sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan mengembangkan fungsi sosialnya.

Pengentasan kemiskinan sebagai salah satu program yang digalakkan untuk pembangunan masyarakat menuju kesejahteraan sosial dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk program Beras Sejahtera (Rastra) serta pembentukan Tim Penggerak Kesehatan Keluarga (TPKK) dan Kader Posyandu yang tersebar di setiap kecamatan.

Program Beras Sejahtera yang dibagikan kepada rumah tangga sasaran berjumlah 12.891 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan RTS tertinggi di Kecamatan Tasifeto Timur sebanyak 2.108 dan terendah di Kecamatan Atambua Barat sebanyak 282 RTS.



Tabel IV.11
DATA RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM RASTRA (BERAS SEJAHTERA)
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTS	PAGU
1	RAIMANUK	1,521	273,780
2	TASIFETO BARAT	1,213	218,340
3	KAKULUK MESAK	1,584	285,120
4	NANAET DUABESI	376	67,680
5	KOTA ATAM BUA	1,322	237,960
6	ATAM BUA BARAT	282	50,760
7	ATAM BUA SELATAN	551	99,180
8	TASIFETO TIMUR	2,108	379,440
9	RAIHAT	1,761	316,980
10	LASIOLAT	584	105,120
11	LAMAKNEN	766	137,880
12	LAMAKNEN SELATAN	823	148,140
JUMLAH KESELURUHAN		12,891	2,320,380

Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Belu Tahun 2018

Pada Tabel IV.12 menggambarkan jumlah Penggerak Kesejahteraan Keluarga yang tersebar di kecamatan. PKK yang tersebar di setiap kecamatan 1 unit ditambah jumlah PKK Tingkat Desa sebanyak 1 unit sesuai jumlah desa yang berada dalam setiap kecamatan.



Tabel IV.12
DATA PENGGERAK KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PKK		JUMLAH KESELURUHAN
		TK.KEC	TK. DESA/KEL	
1	RAIMANUK	1	9	10
2	TASIFETO BARAT	1	8	9
3	KAKULUK MESAK	1	6	7
4	NANAET DUABESI	1	4	5
5	KOTA ATAM BUA	1	4	5
6	ATAM BUA BARAT	1	4	5
7	ATAM BUA SELATAN	1	4	5
8	TASIFETO TIMUR	1	12	13
9	RAIHAT	1	6	7
10	LASIOLOT	1	7	8
11	LAMAKNEN	1	9	10
12	LAMAKNEN SELATAN	1	8	9

Sumber: Dinas PMD Kab.Belu Tahun 2018

Tabel IV.13
DATA POSYANDU DAN KADER POSYANDU
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH	
		POSYANDU	KADER
1	RAIMANUK	22	110
2	TASIFETO BARAT	30	150
3	KAKULUK MESAK	48	240
4	NANAET DUABESI	44	220
5	KOTA ATAM BUA	25	125
6	ATAM BUA BARAT	56	280
7	ATAM BUA SELATAN	24	120
8	TASIFETO TIMUR	21	105
9	RAIHAT	34	170
10	LASIOLOT	19	95
11	LAMAKNEN	63	315
12	LAMAKNEN SELATAN	33	165
JUMLAH KESELURUHAN		419	2,095

Sumber: Dinas PMD Kab.Belu Tahun 2018



Posyandu sebagai kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang berada di Kabupaten Belu berjumlah 419 unit yang ditunjang oleh Kader Posyandu sebanyak 2.095 orang.

4.5. AGAMA

Negara menjamin serta memberi kebebasan kepada tiap-tiap penduduk untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya. Sehingga di setiap daerah termasuk Kabupaten Belu memiliki pemeluk agama yang diakui oleh negara. Hal ini didukung oleh ketersediaan sarana ibadah dan rohaniwan/rohaniwati dari setiap agama.

Tabel IV.14 diketahui pemeluk agama terbanyak di Kabupaten Belu adalah agama Katolik berjumlah 194.177 orang yang didukung dengan sarana ibadah sebanyak 78 buah dan rohaniwan Katolik sebanyak 282 orang.



Tabel IV.14
DATA BIDANG KEAGAMAAN DI KABUPATEN BELU

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pemeluk Agama	
	a. Islam	9,564 Orang
	b. Kristen	15,137 Orang
	c. Katolik	194,177 Orang
	d. Hindu	430 Orang
	e. Budha	44 Orang
	f. Konghucu	0 Orang
	g. Lainnya	0 Orang
2	Sarana Ibadah	
	a. Masjid	10 Buah
	b. Surau/Mushola	4 Buah
	c. Gereja Kristen	36 Buah
	d. Gereja Katolik/Kapela	78 Buah
	e. Pura/Kuil/Sangghah	2 Buah
	f. Vihara/Cetya/Klenteng	1 Buah
3	Rohaniwan	
	a. Pendeta	40 Orang
	b. Guru Injil	11 Orang
	c. Pastor	94 Orang
	d. Bruder	4 Orang
	e. Suster	184 Orang
	f. Pinandita	2 Orang
	g. Imam	24 Orang
	h. Chatib	24 Orang

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu



BAB V SUMBERDAYA ALAM

5.1. PERTANIAN

Pertanian dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian. Selain menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian juga sedang menjadi prioritas untuk ditingkatkan produktivitasnya sehingga merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah serta diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia secara nasional.

Dari Tabel V.1 dan V.2 tergambar bahwa produksi tanaman pangan tertinggi yaitu pada tanaman jagung sebanyak 43.615,2 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Raimanuk sebanyak 7.743 ton dengan luas tanam 2.581 ha. Diikuti dengan tanaman padi sebanyak 25.352 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Tasifeto Timur sebanyak 7.396 ton dengan luas tanam 1.999 ha.

Tanaman ubi kayu berada di peringkat ketiga dengan produksi sebanyak 13.326 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Raihat sebanyak 3.677 ton dengan luas tanam 817 ha.



Tabel V.I
LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	PADI			JAGUNG			KEDELAI		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	RAIMANUK	811	3,001	37	2581	7743	30	0	0	0
2	TASIFETO BARAT	1,507	5,576	37	1479	4437	30	0	0	0
3	KAKULUK MESAK	298	1,043	35	553	1603.7	29	0	0	0
4	NANAET DUABESI	77	264	34	681	1839	27	0	0	0
5	KOTA ATAM BUA	41	152	37	239	502	21	0	0	0
6	ATAM BUA BARAT	8	28	35	29	72.5	25	0	0	0
7	ATAM BUA SELATAN	10	37	37	118	295	25	0	0	0
8	TASIFETO TIMUR	1,999	7,396	37	2480	7440	30	0	0	0
9	RAIHAT	955	3,534	37	1736	5208	30	0	0	0
10	LASIOLAT	207	704	34	826	2478	30	0	0	0
11	LAMAKNEN	1,029	3,597	35	1825	5475	30	0	0	0
12	LAMAKNEN SELATAN	7	20	29	2174	6522	30	2	2	10
UMLAH KESELURUHAN		6949	25352	36.48	14721	43615.2	30	2	2	10

Sumber: Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

Keterangan :

Kolom 1 : Luas Panen (ha)

Kolom 2 : Produksi (ton)

Kolom 3 : Produktivitas (kw/ha)



Tabel V.2

LUAS PANEN, PRODUKSI & PRODUKTIVITAS KACANG TANAH, KACANG HIJAU, UBI KAYU
DAN UBI JALAR BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	KACANG TANAH			KACANG HIJAU			UBI KAYU			UBI JALAR		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	RAJMANUK	0	0	0	23	18.4	8	700	2800	40	13	29.9	24
2	TASIFETO BARAT	0	0	0	42	34	8	232	742	32	10	20	20
3	KAKULUK MESAQ	37	59.2	16	6	3.6	6	141	705	50	13	23.4	18
4	NANAET DUABESI	30	48	16	55	33	6	152	547	36	15	39	27
5	KOTA ATAM BUA	2	2.2	11	5	3	6	20	64	32	5	8	16
6	ATAM BUA BARAT	8	13	16	2	0.8	4	19	61	32	6	10.2	20
7	ATAM BUA SELATAN	7	10.5	15	3	1.5	5	33	106	32	11	13.2	17
8	TASIFETO TIM UR	54	86	16	78	55	7	257	1028	40	35	80.5	23
9	RAIHAT	236	401	17	453	408	9	817	3677	45	36	65	23
10	LASIOLAT	48	77	16	121	97	8	175	560	32	6	9.6	16
11	LAMAKNEN	36	58	16	330	264	8	749	2622	35	16	40	25
12	LAMAKNEN SELATAN	74	89	12	35	28	8	115	414	36	5	140.5	21
JUMLAH KESELURUHAN		532	843.9	15.86	1153	946.3	8	3410	13326	39	171	479.3	28.03

Sumber: *Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu*

Keterangan :

Kolom 1 : Luas Panen (ha)

Kolom 2 : Produksi (ton)

Kolom 3 : Produktivitas (kw/ha)

5.2. PERKEBUNAN

Komoditas perkebunan merupakan salah satu komoditas unggulan yang mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat. Upaya pengembangan komoditas tersebut diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan kuantitas produk, melainkan disertai peningkatan kualitas, keamanan, kontinuitas produksi dengan tingkat harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar.



Tabel V.3 menggambarkan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Belu. Produksi tanaman perkebunan tertinggi adalah tanaman kemiri sebanyak 463 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 103 ton dengan luas tanam 243 ha. Diikuti dengan tanaman jambu mete sebanyak 295 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 95 ton dengan luas tanam 90 ha dan tanaman kelapa sebanyak 263 ton dengan produksi tertinggi di Kecamatan Tasifeto Timur sebanyak 71 ton dengan luas tanam 331 ha.

Tabel V.3
LUAS AREAL & PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN BERDASARKAN KECAMATAN & KOMODITI
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	Kapuk		Kemiri		Kelapa		Kopi		jambu Mete		Pinang		arak Pagat	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1	RAIMANUK	7	1	41	19	55	24	13	4	259	35	4	2	100	5
2	TASIFETO BARAT	7	4	125	47	16	12	19	4	238	57	4	1	49	5
3	KAKULUK MESAK	10	5	4	2	94	54	-	-	331	95	3	1	72	12
4	NANAET DUBESI	6	3	99	48	12	7	6	2	108	17	21	1	67	6
5	KOTA ATAM BUA	3	1	3	1	3	1	-	-	87	9	-	-	35	5
6	ATAM BUA BARAT	4	1	4	2	13	8	-	-	10	2	-	-	34	7
7	ATAM BUA SELATAN	5	1	3	1	10	8	3	1	15	4	-	-	39	3
8	TASIFETO TIMUR	11	3	110	88	90	71	13	5	279	57	4	2	82	5
9	RAIHAT	11	3	51	23	16	15	-	-	11	3	8	3	11	2
10	LASJOLAT	8	3	245	103	30	26	10	3	74	15	12	5	6	2
11	LAMAKNEN	5	2	150	76	21	17	27	13	3	1	10	2	2	1
12	LAMAKNEN SELATAN	7	3	108	53	22	20	154	43	-	-	10	3	3	1
JUM LAH KESELURUHAN		84	30	943	463	382	263	245	75	1,415	295	76	20	500	54

Sumber: Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

Keterangan :															
Kolom 1 :	Luas Areal (ha)														
Kolom 2 :	Produksi (ton)														



5.3. PETERNAKAN

Kabupaten Belu merupakan salah satu daerah target pengembangan usaha peternakan secara nasional karena didukung oleh karakter wilayah serta mempunyai potensi padang penggembalaan yang cukup luas dan lahan tidur yang sementara tidak diusahakan. Potensi tersebut merupakan suatu kekuatan dan peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan pada sub sektor peternakan untuk dikelola secara lebih professional demi meningkatkan produksi dan produktifitas ternak.

Tabel V.4 menggambarkan data populasi ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang ada di Kabupaten Belu pada tahun 2017. Ternak besar yang ada di Kabupaten Belu seperti sapi, kerbau, dan kuda, ternak kecil seperti babi, kambing, dan domba serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras, dan bebek/itik/angsa merupakan ternak yang menjadi minat masyarakat untuk dikembangkan. Jumlah ternak besar di tahun 2017 sebanyak 71.129 ekor dengan populasi terbanyak pada ternak sapi sebanyak 69.621 ekor dan populasi ternak terkecil pada ternak kuda sebanyak 734 ekor.

Populasi ternak kecil berjumlah 72.622 ekor dengan populasi terbanyak pada ternak babi sebanyak 56.712 ekor dan populasi ternak terkecil pada ternak domba hanya sebanyak 33 ekor. Ternak unggas pada tahun 2017 sebanyak 296.117 ekor dengan populasi terbanyak pada ternak ayam buras sebanyak 186.100 ekor dan populasi ternak unggas terkecil pada ternak bebek/itik/angsa sebanyak 6.459 ekor.



Tabel V.4
POPULASI TERNAK BERDASARKAN KECAMATAN DAN JENIS
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	TERNAK BESAR			TERNAK KECIL			TERNAK UNGGAS		
		SAPI	KERBAU	KUDA	BABI	KAM BING	DOMBA	AYAM BURAS	AYAM RAS	BEBEK/ITIK/ANGSA
1	RAIMANUK	9046	189	27	8996	1726	0	27700	8747	172
2	TASIFETO BARAT	9082	215	8	5841	2073	0	24214	65621	989
3	KAKULUK MESAK	8311	50	8	8541	3695	4	27235	828	1055
4	NANAET DUABESI	4809	78	83	1826	527	0	4866	41	16
5	KOTA ATAM BUA	1079	22	1	3941	380	6	3770	1088	765
6	ATAM BUA BARAT	1394	10	5	3028	530	0	15212	2479	633
7	ATAM BUA SELATAN	786	6	0	3612	618	3	17551	24443	1326
8	TASIFETO TIMUR	13321	104	2	7596	3421	0	29532	213	1090
9	RAIHAT	5181	9	11	3590	1039	20	6566	37	367
10	LASIOLAT	4203	4	9	2065	393	0	9624	55	19
11	LAMAKNEN	6530	35	347	4998	940	0	13102	0	6
12	LAMAKNEN SELATAN	5879	52	233	2678	535	0	6728	6	21
JUMLAH KESELURUHAN		69621	774	734	56712	15877	33	186100	103558	6459
		TERNAK BESAR		71129	TERNAK KECIL		72622	TERNAK UNGGAS		296117

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Kab.Belu Tahun 2018

5.4. PERIKANAN

Pembangunan di sektor perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai jual. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai.



Tabel V.5 di bawah ini menjelaskan tentang jumlah rumah tangga nelayan dan rumah tangga perikanan di Kabupaten Belu pada tahun 2017. Jumlah nelayan sebanyak 2.415 orang dengan kategori usaha nelayan penuh sebanyak 1.665 orang dan rumah tangga perikanan sebanyak 483 rumah tangga dengan rumah tangga perikanan nelayan penuh sebanyak 333 rumah tangga.

Tabel V.5
DATA NELAYAN DAN RUMAH TANGGA PERIKANAN LAUT
BERDASARKAN KATEGORI USAHA DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KATEGORI USAHA	JUMLAH NELAYAN	RUMAH TANGGA PERIKANAN
1	Nelayan Penuh	1665	333
2	Nelayan Sambilan Utama	450	90
3	Nelayan Sambilan Tambahan	300	60
TOTAL KESELURUHAN		2,415	483

Sumber: Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

Tabel V.6 menggambarkan produksi perikanan di Kabupaten Belu pada tahun 2017 mencapai 1.659 ton dengan produksi perikanan laut sebesar 1.513.7 ton dengan kecamatan penghasil perikanan laut di Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 1135,3 ton dan perikanan darat sebanyak 145,30 ton yang terdiri dari produksi ikan tambak sebanyak 116.6 ton terbanyak di Kecamatan Kakuluk Mesak sebanyak 105,1 ton dan produksi ikan air tawar sebanyak 28,70 ton terbanyak di Kecamatan Raihat sebanyak 8,90 ton.



Tabel V.6

PRODUKSI PERIKANAN BERDASARKAN SUB SEKTOR DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	PERIKANAN LAUT	PERIKANAN DARAT		JUMLAH
			TAMBAK	AIR TAWAR	
1	RAIMANUK	0	0	7.45	7.45
2	TASIFETO BARAT	0	0	0.18	0.18
3	KAKULUK MESAK	1135.3	105.1	2.50	1242.90
4	NANAET DUABESI	0	0	0.00	0.00
5	KOTA ATAM BUA	0	0	0.14	0.14
6	ATAM BUA BARAT	0	0	0.14	0.14
7	ATAM BUA SELATAN	0	0	0.49	0.49
8	TASIFETO TIMUR	378.4	11.5	4.90	394.80
9	RAIHAT	0	0	8.90	8.90
10	LASOLAT	0	0	2.70	2.70
11	LAMAKNEN	0	0	1.30	1.30
12	LAMAKNEN SELATAN	0	0	0.00	0.00
TOTAL KESELURUHAN		1513.7	116.6	28.70	1659.0

Sumber: Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

Tabel V.7 merupakan tabel yang menggambarkan jumlah perahu/kapal penangkap ikan berdasarkan tipe yang digunakan untuk menangkap ikan. Ada 3 tipe perahu yaitu perahu tanpa motor berjumlah 662 buah, perahu motor tempel sebanyak 332, buah dan perahu motor sebanyak 28 buah.



Tabel V.7
**JUMLAH PERAHU/KAPAL PENANGKAP IKAN BERDASARKAN TIPE
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017**

NO	TIPE	JUMLAH
1	Perahu Tanpa Motor	662
	Jukung	81
	Perahu Kecil	282
	Perahu Sedang	267
	Perahu Besar	32
2	Perahu Motor Tempel	332
3	Kapal Motor	28
	0-5 GT	21
	6-10 GT	7
	10-ke atas	-
JUMLAH KESELURUHAN		1,022

Sumber: *Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu*

5.5. KEHUTANAN

Peran sektor kehutanan dalam pembangunan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dengan adanya peningkatan peran hutan diharapkan dapat mendukung sektor lainnya dalam menyangga kehidupan.

Luas kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas sesuai Keputusan Menteri Kehutanan, shp Wilayah Administrasi Kabupaten Belu (BIG) serta Keputusan MenLHK sebesar 36.909,556 ha yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Lindung di Kabupaten Belu seluas 35.294,588 ha. Luas Hutan Produksi sebesar 961,793 ha sedangkan luas Hutan Produksi Terbatas sebesar 12,682 Ha.



Tabel V.8
LUAS KAWASAN HUTAN & PENYEBARANNYA BERDASARKAN BERITA ACARA (BA)
TATA BATAS DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KAWASAN HUTAN	NOMOR RTX	FUNGSI	LUAS (Ha)	LOKASI PENYEBARAN	
					KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	Bifemnasi	184	Hutan	8535.761	Atambua Barat	Umanen
	Sonhmahole		Lindung		Atambua Selatan	Manuaman
					Kakuluk Mesak	Leosama & Fatuketi
					Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa & Naitimu
		Hutan	653.175	Kakuluk Mesak	Fatuketi	
		Produksi		Tasifeto Barat	Tukuneno	
		Terbatas				
2	Tukubesi	95	Hutan	271.019	Tasifeto Timur	Silawan
			Lindung		Kakuluk Mesak	Kenebibi
3	Fatukaduak	93	Hutan	1700.052	Kakuluk Mesak	Kenebibi
					Tasifeto Timur	Tulakadi
					Kakuluk Mesak	Jenilu, Kabuna & Dualaus
4	Wemata	91	Hutan	154.741	Atambua Selatan	Fatukbot
			Produksi		Tasifeto Barat	Naekasa
5	Udukama	90	Hutan	202.980	Atambua Selatan	Fatukbot
			Produksi		Tasifeto Barat	Naekasa
6	Halilulik	87	Hutan	604.072	Tasifeto Barat	Bakustulama
			Produksi			& Naitimu
7	Lakaan Mandeu	187	Hutan	21630.954	Lamaknen Selatan	Sisifatuberal, Lutharato & Debululik
			Lindung		Lamaknen	Maudemu
					Tasifeto Timur	Halomodok, Takirin & Dafala
					Tasifeto Barat	Lookeu, Derokfaturene, Bakustustulama & Lawalutulus
					Nanaet Dubesi	Fohoeka, Nanaet,



NO	KAWASAN HUTAN	NOMOR RTX	FUNGSI	LUAS (Ha)	LOKASI PENYEBARAN	
					KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
8	Lakaan	94	Hutan Lindung	3144.120	Tasifeto Timur	Sarabau, Hallimodok & Bauho
					Lasiolat	Lakanmau & Duatasi Raiulun
					Lamaknen	Dirun & Maudemu
					Lamaknen Selatan	
9	Fatusaka	202	Hutan Lindung	12.682	Nanaet Dubesi	Nanaenoe
					Raimanuk	Faturika
JUMLAH KESELURUHAN				3156.802		

Sumber: UPT KPH Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2018

Tabel V.9
PRODUKSI HASIL HUTAN BERDASARKAN KECAMATAN & JENIS
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JENIS KAYU			JUMLAH
		KAYU JATI BULAT	KAYU JATI OLAHAN	KAYU RIMBA CAMPUR	
1	RAIMANUK	0	109.1940	8.8000	117.9940
2	TASIFETO BARAT	12.3809	39.1914	0	51.5723
3	KAKULUK MESAK	0	8.4108	0	8.4108
4	NANAET DUABESI	0	0	0	0.0000
5	KOTA ATAM BUA	0	0.6952	0	0.6952
6	ATAM BUA BARAT	6.7402	4.5378	0	11.2780
7	ATAM BUA SELATAN	0	21.8790	0	21.8790
8	TASIFETO TIMUR	105.224	166.6220	7.5883	279.4343
9	RAIHAT	1.9698	10.6388	0	12.6086
10	LASIOLOT	0	31.1624	0	31.1624
11	LAMAKNEN	0.5089	12.2321	0	12.7410
12	LAMAKNEN SELATAN	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		126.8238	404.5635	16.3883	547.7756

Sumber: Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu



Tabel V.9 menggambarkan produksi hasil hutan di Kabupaten Belu. Produksi hasil hutan didominasi oleh produksi kayu jati olahan sebanyak 404, 5635 m³. Kecamatan Tasifeto Timur merupakan penghasil kayu jati olahan terbanyak dengan jumlah 166,6220 m³.

Kayu jati bulat merupakan produksi hasil hutan yang kedua dengan jumlah produksi sebanyak 126,8238 m³ dengan produksi terbesar di Kecamatan Tasifeto Timur sebanyak 105,224 m³ dan produksi kayu rimba lainnya sebanyak 16,3883 m³ dengan hasil terbanyak di Kecamatan Raimanuk sebanyak 8,8000 m³.

4.6. PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Kehidupan manusia moderenpun semakin tergantung kepada energi, sehingga kesejahteraannya sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang dimanfaatkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, energi juga merupakan unsur penunjang yang amat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan ikut menentukan keberhasilan pembangunan di sektor lain. Energi juga merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan atau diekspor sehingga dapat berperan pula sebagai sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang penting.



Kabupaten Belu termasuk kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di Kabupaten Belu pada tahun 2017 dapat dilihat sebarannya di tabel berikut ini.

Tabel V.10
POTENSI HASIL TAMBANG DAN ENERGI BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	POTENSI HASIL TAMBANG	POTENSI ENERGI
1	RAIMANUK	Marmer, Emas, (Hipotek), Batu Gamping Korall, Kalkarenit, Lava Basalt, Gypsum, Mangan	Matahari & Angin
2	TASIFETO BARAT	Emas, (Hipotek), Gas Alam, Marmer, Batu Gamping Korall, Lava Basalt, Alluvial, Lempung, Mud Vulcano, Mangan	Matahari
3	KAKULUK MESAK	Batuan Ultra Basa (Tersusun Oleh Mineral Asbes, Basalt, Oker, Alluvial, Pasir Besi, Batu Setengah Permata Mangan) & Kristal Kuarsa,	Matahari
4	NANAET DUABESI	Mangan	Matahari & Angin
5	KOTA ATAMBUA	Marmer, Alluvial, Lempung, Mangan, Batu Setengah Permata	Matahari
6	ATAM BUA BARAT	Marmer & Mangan	Matahari
7	ATAM BUA SELATAN	Mangan	Matahari
8	TASIFETO TIMUR	Mangan, Emas, (Hipotek)	Matahari
9	RAIHAT	Kalkarenit, Mangan, Batu Setengah Permata & Kristal Kuarsa	Matahari & Air
10	LASOLAT	Mangan	Matahari & Air
11	LAMAKNEN	Emas (Terindikasi), Gypsum & Mangan	Matahari & Angin
12	LAMAKNEN SELATAN	Mangan, Gypsum	Matahari & Angin

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT Tahun 2018



BAB VI INFRASTRUKTUR

Dampak pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai *multiplier* dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan *output* hasil produksi sebagai *input* untuk konsumsi.

Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, jalan, transportasi, dan komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur di subsektor-subsektor tersebut.



6.1. PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia, umumnya mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Padahal pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Sementara pembangunan perumahan merupakan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Kondisi fisik rumah merupakan hal yang penting untuk melihat kelayakan hunian sebuah rumah. Kondisi fisik rumah juga mempengaruhi segi kesehatan pemilik rumah. Bila kondisi fisik rumah tersebut buruk, maka fungsi rumah sebagai pelindung bagi penghuninya tidak akan terpenuhi.

Tabel VI.1 di bawah menggambarkan keadaan infrastruktur di Kabupaten Belu pada tahun 2017.



Tabel VI.1
DATA UMUM BIDANG INFRASTRUKTUR
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN
1	JALAN DAN JEMBATAN		
1	Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan		
	I. Jalan Nasional		
	a. Kondisi Baik	50.6412	Km
	b. Kondisi Rusak Ringan	5.6268	Km
	II. Jalan Provinsi		
	a. Kondisi Baik	42.8851	Km
	b. Kondisi Sedang	2.8	Km
	c. Kondisi Rusak Ringan	12.1599	Km
	d. Kondisi Berat	6.375	Km
	III. Jalan Kabupaten/Kota		
	a. Kondisi Baik	151.27	Km
	b. Kondisi Sedang	29.39	Km
	c. Kondisi Rusak Ringan	44.515	Km
	d. Kondisi Rusak Berat	127.84	Km
2	Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan		
	I. Jalan Nasional		
	II. Jalan Provinsi		
	a. Diaspal	64.22	Km
	III. Jalan Kabupaten/Kota		
	a. Diaspal	182.12	Km
	b. Kerikil	165.395	Km
	c. Tanah	5.5	Km
3	Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan		
	I. Jumlah Jembatan Nasional		
	II. Jumlah Jembatan Provinsi		
	III. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota		
	a. Jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik	33	Unit
	b. Jumlah Jembatan dengan Kondisi Rusak Berat	1	Unit



NO	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN
II	JARINGAN IRIGASI/PENGAIRAN		
1	Panjang Jaringan Irigasi Non Teknis		
	1. Saluran Kondisi Baik	15201.36	Meter
	2. Saluran Kondisi Sedang	183	Meter
	3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3423.9	Meter
	4. Saluran Kondisi Rusak Berat	1238.2	Meter
2	Panjang Jaringan Irigasi Teknis		
	I. Panjang Saluran Irigasi Primer		
	a. Saluran Kondisi Baik	2219.2	Meter
	b. Saluran Kondisi Sedang	244	Meter
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	50	Meter
	d. Saluran Kondisi Berat	6	Meter
	II. Panjang Saluran Irigasi Sekunder		
	a. Saluran Kondisi Baik	7502.55	Meter
	b. Saluran Kondisi Sedang	1000	Meter
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	3943.7	Meter
	d. Saluran Kondisi Berat	1478.8	Meter
	III. Panjang Saluran Irigasi Sekunder		
	a. Saluran Kondisi Baik	2801.10	Meter
	b. Saluran Kondisi Sedang	0	Meter
	c. Saluran Kondisi Rusak Ringan	364.66	Meter
	d. Saluran Kondisi Berat	30	Meter
3	Jumlah Bangunan Irigasi	245	Unit
4	Luas Sawah Beririgasi Teknis	970	Ha
5	Luas Sawah Beririgasi Non Teknis	3230	Ha
6	Luas Daerah Irigasi Teknis	1990	Ha
III	SEMPADAN SUMBER AIR		
	1. Panjang Sungai	213	Meter
	2. Lebar Sungai	206	Meter
IV	KETERSEDIAAN AIR BAKU		
	1. Sumber Air Baku Embung	145374	m3



NO	JENIS DATA	VOLUME	SATUAN
V	JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG RAWAN SUMBER AIR BAKU		
I	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kering Sumber Air		
	1.Lamaknen	4	Desa/Kelurahan
	2.Tasifeto Timur	3	Desa/Kelurahan
	3.Raihat	0	Desa/Kelurahan
	4.Tasifeto Barat	0	Desa/Kelurahan
	5.Kakuluk Mesak	2	Desa/Kelurahan
	6.Kota Atambua	0	Desa/Kelurahan
	7.Raimanuk	3	Desa/Kelurahan
	8.Lasiolat	0	Desa/Kelurahan
	9.Lamaknen Selatan	2	Desa/Kelurahan
	10.Atambua Barat	1	Desa/Kelurahan
	11.Atambua Selatan	0	Desa/Kelurahan
	12.Nanaet Duabesi	2	Desa/Kelurahan

Sumber : Data SIPD Dinas PUPR Kab. Belu Tahun 2018

Berikut data perumahan di Kabupaten Belu pada tahun 2017.

Tabel VI.2
DATA UMUM BIDANG PERUMAHAN DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	INDIKATOR	VOLUME (KK)
1	Rumah Tidak Layak Huni	16,355
2	Rumah Layak Huni	18,536
3	Backlog	5,579

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kab.Belu Tahun 2018

Tabel VI.3 menyajikan ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Belu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Tabel VI.3
NAMA, LOKASI, DEBIT & PANJANG MATA AIR
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	NAMA	LOKASI	DEBIT (Liter/Detik)	PANJANG (m)
1	Silala	Mahuitas	0.7	-
2	Fatulotu	Fatulotu	2.5	-
3	Sisi	Berewen	2.5	-
4	Niti	Webora	0.5	2,820
5	Tukuneno	Webereliku	1	2,124
6	Dirun	Lesuama (Tahap I)	2.5	2,170
		Lesuama (Tahap II)	2.5	3,648
		Berewen (Tahap I)	2.5	500
		Berewen (Tahap II)	2.5	2,792
7	Tasifeto Barat	Inleat	1.5	150
8	Naekasa	Motarama	2	4,049

Sumber: Dinas PUPR Kab.Belu Tahun 2018

6.2. PARIWISATA

Indonesia merupakan salah satu negara sebagai tujuan destinasi pariwisata karena wilayahnya yang memiliki beraneka ragam keindahan pesona alam yang tidak dimiliki oleh banyak negara dan potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Belu memiliki potensi obyek wisata yang besar baik yang sudah dikelola maupun yang belum dikelola oleh pemerintah, sedangkan dari segi sarana dan prasarana pariwisata masih belum memadai karena terbatasnya anggaran dan belum didukung oleh sumber daya manusia yang handal.



Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belu didasarkan pada zona pariwisata “*Laliman*” (*Lakaan, Lidak, Mandeu*) yaitu; (1) Zona Lakaan meliputi Kecamatan Lamaknen Selatan, Lamaknen, Raihat, Lasiolat, dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan fokus pada kegiatan pariwisata budaya dan religius; (2) Zona Lidak meliputi Kecamatan Atambua Kota, Atambua Barat, Atambua Selatan, dan Kecamatan Kakuluk Mesak dengan fokus pada kegiatan pariwisata kuliner, cinderamata, dan wisata bahari; serta (3) Zona Mandeu meliputi Kecamatan Tasifeto Barat, Raimanuk, dan Kecamatan Nanaet Duabesi dengan fokus kegiatan pada pariwisata alam dan budaya.

Tabel VI.4
OBJEK WISATA BERDASARKAN KECAMATAN & JENIS
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	WISATA ALAM/BAHARI	WISATA MINAT KHUSUS	KET
1	Raimanuk	Panorama Gunung Mandeu		
2	Tasifeto Barat		Situs Lalian Tolu Gua Maria Mahanu	
3	Kakuluk Mesak	Kolam Susuk Teluk Gurita Pantai Adufik Pantai Pasir Putih Air Terjun We Ro	Gua Maria Fatima Terowongan Pendaratan Pasukan Jepang Kuburan Misionaris Katolik Pertama Pantai Selowati	
4	Nanaet Duabesi		Kuburan Tua Raja Nanaet Duabesi	
5	Kota Atambua		Istana Keuskupan Atambua Taman Makam Pahlawan Seroja	
6	Atambua Barat		Perkampungan Adat Matabesi	



NO	KECAMATAN	WISATA ALAM/BAHARI	WISATA MINAT KHUSUS	KET
7	Atambua Selatan	Kolam Pemandian Mata Air Tirta		
8	Tasifeto Timur	Bendungan Haekriit Bendungan Sirani	Ksadan Takirin Pintu Perbatasan Motaain Kuburan Raja Bauho	
9	Raihat	Mata Air Webot Gua Kelelawar	Pintu Perbatasan Turiskain Ksadan Sese Rai	
10	Lasiolat	Mata Air Lahurus Air Terjun Mauhalek Gua Alam Lia Asu	Gereja Tua Lahurus Benteng Kota Mutin Meriam Peninggalan Portugis Ksadan Fatubesi	
11	Lamaknen	Panorama Gunung Lakaan Bendungan Haleleki Holleki Air Terjun Lesutil	Lokasi Pembuatan Alat Musik Tihar Benteng Makes Perkampungan Adat Loegatal	
12	Lamaknen Selatan		Pintu Perbatasan Lakmaras Perkampungan Adat Nualain Gereja Tua Nualain Pintu Perbatasan Henes	

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Belu Tahun 2018

6.3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) yang sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan masyarakat di era informasi turut memengaruhi pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin peran TIK di daerahnya masing-masing. Pendayagunaan teknologi informasi oleh pemerintah terutama digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.



Dalam *e-government*, TIK akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan informasi yang baik oleh suatu daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam percepatan pembangunan daerah.

Pada tahun 2017 pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi secara mandiri oleh masyarakat dalam rangka penyebaran informasi semakin berkembang di tingkat kecamatan. Potensi pengguna pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dan media massa milik pemerintah dan swasta serta dapat dilihat pada beberapa tabel di bawah ini.

Tabel VI.5
POTENSI PENGGUNA PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	POTENSI	OPERATOR	VOLUME/ SATUAN
1	JUMLAH MENARA		
	a. Monopole	Exel	10
	b. Menara Kaki Tiga	Telkomsel	40
	c. Menara Empat Kaki		7
2	Pengusaha Jasa Titipan	Atambua	
	a. PT. Pos Indonesia	Atambua	1
	b. TIKI	Atambua	1
	c. J&T	Atambua	1
	d. JNE	Atambua, Weluli, Atapupu, Halilulik	4
	e. Timor Cargo	Atambua	7
3	Broadband Desa Terpadu	Telkomsel	1
4	Jumlah Operator Selular	Telkomsel	150,000

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Belu Tahun 2018



Tabel VI.6
JENIS MEDIA MASSA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	JENIS	MEDIA	NO	JENIS	MEDIA
1	TABLOID	Warta Belu,	13	WEBSITE	belukab.go.id
		Parlementer Belu			lpse.belukab.go.id
2	BULETIN	Citra Anak Belu			kominfokabelu.go.id
3	MEDIA NASIONAL	TVRI			pmptsp.belukab.go.id
4	TELEVISI	LPPL Belu TV/TV Lokal			inspektorat.belukab.go.id
5	RADIO	RSPD Belu			rsud.belukab.go.id
6	RADIO KOMUNITAS	Desa Silawan, Kec. Tasbar			bp4d.belukab.go.id
7	RUMAH TIK	Desa Nanaet Duabesi			bagianpembangunan.belukab.go.id
8	KELOMPOK	Kec. Tastim, Tasbar			bpkad.belukab.go.id
	INFORMASI	Atambua Barat ,			dinaspk.belukab.go.id
	MASYARAKAT	Atambua Selatan, Kel.			dinaspuur.belukab.go.id
	(KIM/KIM SOSDES)	Fatubena, Umanen			dinaspp.belukab.go.id
9	MEDIA SOSIAL	Humas Setda Belu			bapenda.belukab.go.id
10	BTS	BTS Kewar			ppid.belukab.go.id
		BTS Desa Maneikun			simada.belukab.go.id
		BTS Desa Baudaok			simreda.belukab.go.id
		BTS Sadi			silawan.desa.id
		BTS Fohoeka			maneikun.desa.id
11	PERSANDIAN	Santel Kabupaten			tohe.desa.id
		SSB Lamaknen			duarato.desa.id
		SSB Lamaknen Selatan			lutharato.desa.id
		SSB Raihat			fulur.desa.id
		SSB Kakuluk Mesak			renrua.desa.id
		SSB Lasiolat			leutolu.desa.id
		SSB Tastim			lookeu.desa.id
		SSB Tasbar			toheleten.desa.id
		SSB Raimanuk			loonuna.desa.id
		SSB Nanaet Duabesi			nualain.desa.id
12	LAYANAN PUBLIK	SISDUKCAPIL Kab. Belu			dafala.sideka.id
E-GOVERNMENT		LPSE Kabupaten Belu			manumutin.sideka.id
		SIMDA Belu			manumutin.sideka.id
		BPJS Kab. Belu			fatubaa.sideka.id
		BPN Kab. Belu			asumanu.sideka.id
		Kantor Pajak Atambua			manumutin.sideka.id
		Dapodik Kab. Belu			faturika.sideka.id
		Media Centre Kab. Belu			tulakadi.sideka.id
		Mobil M-Mustika			raifatus.sideka.id

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Belu Tahun 2018



Tabel VI.7
JENIS MEDIA MASSA MILIK SWASTA
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	JENIS	MEDIA	NO	JENIS	MEDIA
1	KORAN	Kompas	4	MINGGUAN	Mingguan Hidup
		Pos Kupang			Mingguan Azas
		Timor Express	5	TELEVISI	MNC GROUP
		Jawa Pos			RCTI
Victory News		GLOBAL TV			
2	MAJALAH	Tempo			I NEWS
		Kartini			KOMPAS TV
		Femina			METRO TV
		Ayah Bunda			SCTV
		Trubus			NET TV
3	TABLOID	Nyata			INDOSIAR
		Wanita Indonesia			TRANS TV
		Nova			TRANS 7
		Automotif	6	RADIO	Radio Favorit
		Bola			Dian Mandiri
Saji			Misi Kalvari FM		
				Rajawali	

Sumber: Dinas Kominfo Kab.Belu Tahun 2018



BAB VII EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

7.1. EKONOMI

7.1.1. INDUSTRI PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat strategis dalam mata rantai aktivitas ekonomi karena berperan sebagai mediator antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Sebagai jaringan distribusi yang melayani kebutuhan masyarakat baik untuk barang konsumtif maupun produktif maka segala kebijakan di sektor perdagangan selalu diarahkan untuk menjamin penyebaran serta ketersediaan berbagai barang kebutuhan tersebut secara lebih merata dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Tabel VII.1
SARANA PERDAGANGAN BERDASARKAN JENIS
DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	JENIS	JUMLAH
1	Perdagangan Besar	1
2	Perdagangan Menengah	33
3	Swalayan	16
4	Perdagangan Kecil	225
5	Rumah Makan/Restoran	43
6	Hotel/Losmen	13
7	Perdagangan Mikro	129
JUMLAH KESELURUHAN		460

Sumber: Dinas Perdagind Kab.Belu &
Belu Dalam Angka BPS Kab.Belu Tahun 2018



Tabel VII.2

**BANYAKNYA PERUSAHAAN/USAHA & PEKERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
BERDASARKAN KECAMATAN & JENIS INDUSTRI DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	INDUSTRI HASIL PERTANIAN & KEHUTANAN		INDUSTRI LOGAM, MESIN & KIMIA	
		INDUSTRI	PEKERJA	INDUSTRI	PEKERJA
1	RAIMANUK	4	4	4	4
2	TASIFETO BARAT	20	72	35	123
3	KAKULUK M ESAK	4	18	7	9
4	NANAET DUABESI	0	0	0	0
5	KOTA ATAMBUA	45	142	30	125
6	ATAMBUA BARAT	56	210	31	115
7	ATAMBUA SELATAN	40	147	46	125
8	TASIFETO TIMUR	0	0	3	4
9	RAIHAT	0	0	6	6
10	LASIOLAT	2	7	4	5
11	LAMAKNEN	4	14	9	9
12	LAMAKNEN SELATAN	0	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		175	614	175	525

Sumber: Dinas Perdagangan Kab.Belu Tahun 2018

Perkembangan kelompok industri maupun peluang usaha yang dapat dikembangkan di Kabupaten Belu adalah Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan (IPHK) yang meliputi Industri pengolahan hasil pertanian, industri aneka meliputi : industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional, dan industri pakaian jadi dari tekstil serta Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILMK) meliputi industri garam rakyat, barang dari semen, barang dari tanah liat (bata, genteng, tembikar), vulkanisir ban, serta jasa perbengkelan, dan elektronik.



Industri rumah tangga atau industri aneka memegang peranan yang cukup penting bagi pendapatan daerah. Industri rumah tangga yang dimaksudkan di atas meliputi industri tenun ikat, anyam-anyaman, industri tahu/tempe. Walaupun hanya berstatus industri rumah tangga, tetapi sudah terpasarkan keluar daerah seperti tenun ikat dan anyam-anyaman.

7.1.2. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah dan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang memperoleh legitimasi formal dalam konstitusi. Karena itu secara konseptual koperasi harus mampu tampil sebagai penyelamat ekonomi rakyat dari ancaman badai ekonomi kapitalis yang mengandalkan kekuatan modal individual atau modal bersama. Namun dalam operasionalisasinya, lembaga koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) masih kalah bersaing karena keterbatasan SDM yang berwatak sosial.

Berikut data keadaan koperasi di Kabupaten Belu tahun 2017.



Tabel VII.3
KEADAAN KOPERASI DI KABUPATEN BELU TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI		JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH MODAL
		AKTIF	TIDAK AKTIF		
1	RAIMANUK	1	2	1421	Rp 188,110,000
2	TASIFETO BARAT	5	0	3278	Rp 3,409,133,010
3	KAKULUK MESAK	2	1	636	Rp 178,088,500
4	NANAET DUABESI	11	0	1796	Rp 2,428,656,224
5	KOTA ATAM BUA	8	4	2589	Rp 2,610,607,929
6	ATAM BUA BARAT	30	15	26164	Rp 293,984,187,319
7	ATAM BUA SELATAN	4	2	206	Rp 282,308,200
8	TASIFETO TIMUR	3	0	112	Rp 112,330,000
9	RAIHAT	0	0	0	Rp -
10	LASIOLAT	20	13	2176	Rp 3,534,487,198
11	LAMAKNEN	22	6	1679	Rp 7,066,415,350
12	LAMAKNEN SELATAN	1	0	114	Rp 43,855,000
JUMLAH KESELURUHAN		107	43	40171	Rp 313,838,178,730

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab.Belu Tahun 2018

7.1.3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sesuai dengan definisi, PDRB adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belu menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.



PDRB atas dasar harga berlaku pada umumnya digunakan untuk mengamati kemampuan sumber daya ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

TABEL VII.4
PDRB KABUPATEN BELU ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 -2017

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGELUARAN LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)		
	2015	2016	2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	728,288.1	790,060.2	850,148.7
2 Pertambangan dan Penggalian	109,743.9	121,448.7	123,672.7
3 Industri Pengolahan	34,217.0	37,788.3	41,751.1
4 Pengadaan Listrik dan Gas	1,546.7	2,046.7	2,303.0
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	766.6	857.8	931.7
6 Konstruksi	250,920.4	288,864.5	333,795.0
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	418,767.5	475,441.6	530,707.9
8 Transportasi dan Pergudangan	149,433.6	167,660.6	188,682.5
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,138.2	12,712.5	15,051.5
10 Informasi dan Komunikasi	137,122.7	145,524.8	156,496.3
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	172,463.3	196,599.3	218,826.8
12 Real Estate	81,075.0	90,872.1	101,049.1
13 Jasa Perusahaan	2,137.7	2,405.3	2,681.2
14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	362,744.3	417,984.3	481,186.3
15 Jasa Pendidikan	457,866.5	524,571.8	599,487.2
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,528.5	75,457.0	85,131.4
17 Jasa Lainnya	101,738.1	113,150.2	125,607.0
PDRB	3,086,498.1	3,463,445.8	3,857,509.6

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab. Belu



7.1.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu terus meningkat dari tahun 2015-2017 walaupun dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur IPM Kabupaten Belu bukan kabupaten dengan angka IPM tertinggi (tetapi bukan juga kabupaten/kota dengan IPM terendah).

IPM tertinggi di Provinsi NTT adalah Kabupaten Kota Kupang dengan angka IPM tahun 2015 sebesar 77,95, tahun 2016 sebesar 78,14, dan tahun 2017 sebesar 78,25. Sementara kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi NTT adalah Kabupaten Sabu Raijua dengan angka IPM pada tahun 2015 sebesar 53,28, tahun 2016 sebesar 54,16, dan tahun 2017 sebesar 55,22.

TABEL VII.5
KOMPONEN IPM KABUPATEN BELU DAN PROVINSI NTT
TAHUN 2015 - 2017

INDIKATOR IPM	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup Provinsi NTT	65.96	66.04	66.07
Umur Harapan Hidup Kabupaten Belu	63.01	63.21	63.42
Harapan Lama Sekolah Provinsi NTT	12.84	12.97	13.07
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Belu	11.80	12.02	12.24
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTT	6.93	7.02	7.15
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu	7.05	7.06	7.07
Pengeluaran Riil Per Kapita Provinsi NTT	7,003.35	7,122.00	7,350.00
Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Belu	7,082.69	7,199.00	7,251.00
IPM Provinsi NTT	62.67	63.13	63.73
IPM Kabupaten Belu	60.54	61.04	61.44

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu



TABEL VII.6
IPM MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2015-2017

NO	IPM	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Sumba Barat	61.36	61.85	62.30
2	Sumba Timur	62.54	63.22	64.19
3	Kupang	62.04	62.39	62.79
4	TTS	59.90	60.37	61.08
5	TTU	60.96	61.54	62.03
6	Belu	60.54	61.04	61.44
7	Alor	58.50	58.99	59.61
8	Lembata	62.16	62.81	63.09
9	Flotim	61.24	61.90	62.89
10	Sikka	61.81	62.42	63.08
11	Ende	65.54	65.74	66.11
12	Ngada	65.10	65.61	66.47
13	Manggarai	60.87	61.67	62.24
14	Rote Ndao	58.32	59.28	60.51
15	Manggarai Barat	60.04	60.63	61.65
16	Sumba Tengah	57.91	58.52	59.39
17	Sumba Barat Daya	60.53	61.31	61.46
18	Nagekeo	63.33	63.93	64.74
19	Manggarai Timur	56.83	57.50	58.51
20	Sabu Raijua	53.28	54.16	55.22
21	Malaka	57.51	58.29	58.90
22	Kota Kupang	77.95	78.14	78.25
NUSA TENGGARA TIMUR		62.67	63.13	63.73

Sumber : Belu Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kab.Belu

7.2. KEUANGAN DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD yang ditunjukkan dari pendapatan daerah, belanja, pembiayaan daerah dan neraca daerah yang mencerminkan perkembangan aset, kewajiban dan ekuitas dana tersedia.



Tabel VII.7 menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tahun 2017.

NO	URAIAN	JUMLAH
I	KEUANGAN DAERAH	
1	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 959,717,412,277.44
	Pendapatan Asli Daerah	Rp 101,246,072,215.34
	Dana Perimbangan	Rp 779,291,768,009.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 79,179,572,053.10
2	JUMLAH BELANJA	Rp 939,748,398,806
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 429,568,482,147
	Jumlah Belanja Langsung	Rp 510,179,916,659.39
3	JUMLAH PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp 82,002,205,023.73
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
	Pembiayaan Netto	Rp 82,002,205,023.73
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 101,971,218,494.78
II	NERACA	
1	ASET	Rp 1,374,602,206,211.91
	Aset Lancar	Rp 149,581,624,156.91
	Investasi Jangka Panjang	Rp 44,308,584,313
	Aset Tetap	Rp 1,180,711,997,742
	Dana Cadangan	Rp -
	Aset Lainnya	Rp 105,324,906,545
2	KEWAJIBAN	Rp 16,053,777,669.00
	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 16,053,777,669
	Kewajiban Jangka Panjang	Rp -
3	EKUITAS	Rp 1,463,873,335,088.30
	Ekuitas	Rp 1,463,873,335,088.30
4	Rasio Lancar	9.32%
5	Rasio Quick	7.88%
6	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0.01%
7	Rasio Hutang Terhadap Modal	0.01%

Sumber : Data SIPD BPKAD Kabupaten Belu Tahun 2018



BAB VIII PENUTUP

Di era otonomi daerah seperti saat ini, masing-masing daerah dituntut untuk semakin mampu memahami karakter wilayahnya masing-masing. Pemahaman wilayah ini akan sangat bermanfaat bagi arah perencanaan dan pengembangan daerah sehingga daerah akan semakin mampu mengelola wilayahnya berdasarkan potensi dan permasalahannya.

Buku Profil Daerah Kabupaten Belu ini, akan mempermudah daerah untuk mengenal potensi sekaligus permasalahannya untuk selanjutnya mempromosikan dan memasarkan kepada pihak lain/investor yang berminat di dalam pengembangan daerah. Buku Profil Daerah Kabupaten Belu selain menjadi dokumen pendukung dalam proses perencanaan, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu dalam menyiapkan perencanaan yang semakin berkualitas dari waktu ke waktu.